

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 *Stakeholder Pressure*

2.1.1.1 Pengertian *Stakeholder Pressure*

Menurut (Silvana & Khomsyiah, 2023) mendefinisikan bahwa *Stakeholder Pressure* merupakan pihak – pihak yang mempunyai pengaruh besar terhadap berjalannya suatu perusahaan, tanpa adanya *stakeholder pressure* perusahaan akan mengalami kesulitan dalam beroperasi. Investor, lingkungan, karyawan, dan konsumen menjadi indikator tekanan pada *stakeholder pressure*. Masing – masing *stakeholder* akan dijelaskan, sebagai berikut:

a. Tekanan Berorientasi Investor

Tekanan berorientasi investor memiliki lebih banyak tanggung jawab karena banyaknya pemegang saham yang memiliki saham dalam perusahaan. *Sustainability report* dapat menunjukkan kegiatan perusahaan dan kinerjanya dari berbagai sudut pandang baik finansial maupun non finansial. Semakin transparan informasi pelaporan perusahaan maka akan meningkatkan kepercayaan *stakeholder* dan investor (Silvana & Khomsyiah, 2023). Sebuah industri dianggap berorientasi investor jika memiliki banyak investor dan kepemilikan sahamnya tersebar luas.

Investor membutuhkan informasi sosial dan lingkungan, terutama yang berkaitan dengan proses pengambilan keputusan. Pemegang saham, terutama pemegang saham mayoritas akan berusaha untuk mendapatkan laporan keberlanjutan yang baik melalui prosedur pengawasan, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Semakin kuat tekanan investor maka akan diikuti oleh laporan keberlanjutan perusahaan yang lebih baik (Sriningsih & Wahyuningrum, 2022). Adanya tekanan (*pressure*) dari pemegang saham menggambarkan bahwa perusahaan berorientasi terhadap investor / pemegang sahamnya.

b. Tekanan Berorientasi Lingkungan

Tekanan berorientasi lingkungan dapat mendorong perusahaan untuk menjadi lebih sensitif terhadap lingkungan, karena setiap tindakan perusahaan pasti berhubungan dengan lingkungan, perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan. Perusahaan yang memiliki dampak lingkungan yang besar tentu akan menghadapi tekanan lingkungan yang lebih besar dari pada perusahaan yang lebih kecil. Tanggung jawab ini dapat ditunjukkan dalam *sustainability report* (Silvana & Khomsyiah, 2023). Ketika suatu perusahaan mengalami tekanan lingkungan, hal ini menunjukkan bahwa perusahaan itu peduli dengan lingkungannya. Pernyataan tersebut dibuat karena operasional perusahaan pasti bersangkutan terhadap lingkungannya sehingga perusahaan harus bertanggung jawab terhadap lingkungan (Putri et al., 2022). Pelestarian lingkungan, pengolahan limbah yang optimal sehingga tidak merusak lingkungan. Reboisasi merupakan salah satu contoh

tanggung jawab yang dapat diambil perusahaan dalam menjaga lingkungan. Selain menjaga lingkungan yang menjadi tanggung jawab perusahaan, perusahaan juga harus mengungkapkannya dalam *sustainability report*. Dengan demikian, pemangku kepentingan dapat mengetahui sejauh mana perusahaan bertanggung jawab akan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh operasional perusahaan. Tingkat sensitifitas perusahaan terhadap lingkungan akan berbeda karena setiap perusahaan memiliki tanggung jawab lingkungan yang berbeda. Adanya tekanan (*pressure*) dari lingkungan sebagai *stakeholder* menggambarkan bahwa industri atau perusahaan tersebut sensitif terhadap lingkungan (Suharyani et., al 2019).

c. Tekanan Berorientasi Karyawan

Industri berorientasi karyawan berarti semakin banyak karyawan yang dimiliki suatu perusahaan, semakin banyak kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Perusahaan harus memenuhi kewajiban terhadap *stakeholder* termasuk karyawannya. Tekanan yang tinggi dari karyawan menyebabkan perusahaan harus meningkatkan transparansinya (Silvana & Khomsyiah, 2023). Saat ini, karyawan dan calon karyawan mempertimbangkan apakah perusahaan tempatnya bekerja merupakan perusahaan yang sadar akan keberlanjutan atau tidak. Karyawan yang berkualitas memiliki pemahaman terhadap betapa pentingnya keberlanjutan (Rudyanto & Siregar, 2017). Adanya (*pressure*) yang diberikan oleh karyawan membuktikan bahwa perusahaan peduli terhadap karyawannya sebagai *stakeholder* dengan kata lain perusahaan berorientasi terhadap karyawannya (Dipo & Aryati, 2019).

d. Tekanan Berorientasi Konsumen

Perusahaan yang memiliki kedekatan dengan konsumen akan lebih dikenal oleh sebagian masyarakat begitupun sebaliknya. Industri dekat konsumen termasuk diantaranya adalah industri makanan, tekstil, barang rumah tangga, layanan telekomunikasi, makanan dan minuman, serta keuangan. Perusahaan yang mengungkapkan informasi tentang aspek sosialnya, menunjukkan bahwa perusahaan memiliki citra sosial yang baik dimata konsumen (Silvana & Khomsyiah, 2023). Konsumen cenderung menaruh perhatian pada perusahaan yang memiliki hubungan dekat dengan konsumen akhir. Perusahaan yang memproduksi barang yang dikonsumsi oleh konsumen akhir cenderung lebih banyak mendapat perhatian dibanding dengan perusahaan yang memproduksi barang produksi. Hal ini memaksa perusahaan untuk memperhatikan tindakan mereka dan beroperasi sesuai dengan keinginan konsumen. Saat ini, konsumen telah mendapatkan informasi yang lebih transparan tentang dampak produk terhadap lingkungan sehingga lebih peduli dengan keberlanjutan. Nilai moral yang dimiliki konsumen terhadap keberlanjutan perusahaan mempengaruhi kualitas *sustainability report* pada bagian lingkungan (Rudyanto & Siregar, 2017).

Stakeholder Pressure adalah keterlibatan industri dunia usaha dalam pembangunan berkelanjutan mencakup pertimbangan terhadap lingkungan. Tekanan lingkungan akan ditujukan kepada perusahaan yang mengeksploitasi alam secara berlebihan sehingga dapat mengganggu keseimbangan kehidupan (Supadi & Sudana, 2018).

Stakeholder Pressure adalah struktur konsentrasi kepemilikan. Konsentrasi kepemilikan adalah suatu kondisi dimana sebagian besar saham perusahaan dimiliki oleh sejumlah kecil individu atau kelompok, sehingga membuat pemegang saham tersebut memiliki saham yang lebih dominan dibandingkan dengan pemegang saham lainnya (Susanto & Joshua, 2018).

Menurut Claudia Leonirda Lulu (2020) mendefinisikan bahwa *Stakeholder Pressure* yaitu mengendalikan perusahaan agar segala tindakan yang dilakukan merupakan cerminan dari kehendak pemiliknya. Selain itu, proses pengawasan pemegang saham terhadap tata kelola perusahaan perlu berjalan dengan baik sehingga mengurangi tindakan dan mendorong perusahaan untuk melakukan pengungkapan yang lebih komprehensif terhadap masyarakat dan lingkungan.”

Menurut Earnhart (2018) *Stakeholder Pressure* adalah kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan perusahaan. *Stakeholder Pressure* merupakan bagian penting dari sebuah perusahaan dan perusahaan tidak dapat beroperasi tanpa adanya *stakeholder pressure*. Kelangsungan hidup suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh pemegang saham. Sebagai pemegang saham di perusahaan, mempunyai kewenangan untuk menghukum dan membatasi perusahaan agar tidak melakukan aktivitas yang merusak lingkungan. Oleh karena itu, manajer dapat menggunakan pengungkapan informasi, seperti emisi gas rumah kaca dan pengelolaan lingkungan, untuk membantu ekspektasi regulator dan sebagai cara untuk mengurangi pelanggaran peraturan (Sandri et al., 2021).

Berdasarkan definisi di atas dapat diartikan bahwa *Stakeholder pressure* didefinisikan sebagai kemampuan dan kapasitas pemegang saham untuk mempengaruhi organisasi dengan mempengaruhi keputusan organisasinya. Saat ini, berbagai tantangan masyarakat dan lingkungan mendorong perusahaan untuk meningkatkan kesadaran lingkungan dan praktik bisnis yang berorientasi masyarakat.

Dari beberapa pengertian di atas mengenai *Stakeholder Pressure* dapat disimpulkan bahwa *Stakeholder Pressure* merupakan akuntansi yang didalamnya mengidentifikasi, mengukur, menyajikan, dan mengungkapkan berbagai tantangan dari aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan pemegang saham yaitu masyarakat dan lingkungan.

2.1.1.2 Tujuan *Stakeholder Pressure*

Menurut (Alfaiz Rizkika Dipo & Aryati Titik, 2019) Tujuan awal dari terbentuknya suatu perusahaan adalah untuk memaksimalkan keuntungan yang dihasilkan dan adanya tanggung jawab kepada pemangku kepentingan atau stakeholder pressure. Namun tetapi pandangan ini semakin berubah kearah yang lebih luas. Perusahaan dituntut untuk tidak hanya mengutamakan kepentingan manajemen dan pemegang saham, mampu mempertimbangkan kepentingan karyawan, konsumen, dan masyarakat. Tekanan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) merupakan faktor penting dalam membentuk tujuan perusahaan. *Stakeholder pressure* atau tekanan pemangku kepentingan merujuk pada pengaruh atau dorongan dari berbagai kelompok yang memiliki kepentingan terhadap keberhasilan suatu perusahaan.

Berikut adalah beberapa tujuan yang mungkin muncul akibat tekanan dari para pemangku kepentingan :

1. *Profitability* (Profitabilitas) : Pemegang saham cenderung mendorong perusahaan untuk memperoleh laba yang tinggi. Mereka berharap agar investasi mereka memberikan pengembalian yang maksimal.
2. *Sustainability* (Keberlanjutan) : Kelompok lingkungan dan masyarakat sering kali menekan perusahaan untuk bertindak secara bertanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial. Mereka dapat meminta perusahaan untuk mengurangi dampak lingkungan, meningkatkan praktik berkelanjutan, atau berpartisipasi dalam program-program sosial.
3. *Ethical Practices* (Praktik Etis): Pemangku kepentingan sering menuntut perusahaan untuk menjalankan praktik bisnis yang etis dan moral. Ini bisa termasuk transparansi dalam pelaporan, perlakuan yang adil terhadap karyawan, atau menjaga hubungan yang adil dengan pemasok.
4. *Customer Satisfaction* (Kepuasan Pelanggan) : Pelanggan dapat menekan perusahaan untuk menyediakan produk atau layanan yang berkualitas tinggi, terjangkau, dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Keluhan pelanggan atau umpan balik negatif dapat memaksa perusahaan untuk melakukan perubahan.

5. *Employee Well-being* (Kesejahteraan Karyawan): Karyawan sering kali menekan perusahaan untuk memberikan kondisi kerja yang lebih baik, kompensasi yang adil, dan kesempatan untuk pengembangan karir.

2.1.1.3 Pengukuran *Stakeholder Pressure*

Tekanan berorientasi pemegang saham memiliki lebih banyak tanggung jawab karena banyaknya pemegang saham yang memiliki saham dalam suatu perusahaan. Pemegang saham memiliki hak untuk mengetahui informasi pada perusahaan yang dapat dilihat pada laporan keuangan tahunan perusahaan dan *sustainability report* yang menjelaskan operasional perusahaan dan kinerja perusahaan dari berbagai sudut pandang, baik finansial maupun non finansial.

Indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah Tingkat konsentrasi struktur kepemilikan saham yang merupakan kondisi dimana sebagian besar saham perusahaan dimiliki oleh sejumlah kecil individu atau kelompok, sehingga membuat pemegang saham tersebut memiliki saham yang lebih dominan dibandingkan dengan pemegang saham lainnya. Kekuatan mengelola tekanan pemegang saham dipengaruhi oleh tingkat konsentrasi dimana semakin besar saham yang dimiliki dalam perusahaan maka semakin besar pula kekuatan pemegang saham dalam memberikan tekanan kepada perusahaan (Arrokhman & Siswanto, 2021). Pemegang saham mayoritas memiliki kendali atas perusahaan sehingga semua tindakan yang dilakukan merupakan cerminan dari kehendak pemiliknya. Selain itu, proses pengawasan pemegang saham terhadap manajemen perusahaan perlu berjalan dengan baik sehingga tindakan menahan informasi akan

berkurang dan mendorong perusahaan untuk melakukan pengungkapan informasi yang lebih luas (Lulu, 2021).

Penelitian ini menggunakan *stakeholder pressure* yang diproksikan dengan tekanan pemegang saham untuk menganalisis variabel *stakeholder pressure*. Perhitungan derajat konsentrasi ini dilakukan dengan cara membandingkan jumlah saham induk dengan total keseluruhan saham. Jika perusahaan induk tidak disebutkan, informasi tentang perusahaan induk dicari dari internet dan situs web perusahaan (Rudyanto & Siregar, 2018).

Pengukuran berdasarkan studi yang dilakukan oleh Thomsen et al., (2006), yaitu tingkat konsentrasi struktur kepemilikan. Derajat konsentrasi diukur dengan membandingkan jumlah saham yang dimiliki perusahaan induk dengan total keseluruhan saham. Perusahaan induk adalah perusahaan dengan nama pemegang saham mayoritas perusahaan pada bagian sifat hubungan dan transaksi pihak berelasi dalam catatan atas laporan keuangan.

Konsentrasi Struktur Kepemilikan

$$SP = \frac{\text{Jumlah Saham yang dipegang perusahaan induk}}{\text{Total Keseluruhan Saham}}$$

2.1.2 Corporate Governance Disclosure

2.1.2.1 Pengertian Good Corporate Governance

Istilah *Corporate Governance* sering kali diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai tata kelola perusahaan. Dalam modul ini, istilah *Corporate Governance* dan tata kelola perusahaan tersebut dipergunakan secara bergantian.

Pengertian *Corporate Governance* sendiri telah dikemukakan oleh banyak institusi dan para pakar. Berikut ini disajikan beberapa definisi *Corporate Governance* yang banyak digunakan sebagai acuan dalam diskusi dan tulisan – tulisan.

Secara umum istilah *Good Corporate Governance* merupakan sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan yang dapat mengurus perusahaan (*hard definition*), maupun ditinjau dari nilai – nilai yang terkandung dari mekanisme pengelolaan itu sendiri (*soft definition*).

Corporate Governance adalah rangkaian proses terstruktur yang digunakan untuk mengelola serta mengarahkan atau memimpin bisnis dan usaha – usaha korporasi dengan tujuan untuk meningkatkan nilai – nilai perusahaan serta kontinuitas usaha. *Corporate Governance* pertama kali diperkenalkan oleh *Cadbury Committee* tahun 1992 dalam laporannya yang dikenal sebagai *Cadbury Report*. Terdapat banyak definisi tentang *Corporate Governance* yang dipengaruhi oleh teori yang melandasinya. Perusahaan / korporasi dapat dipandang dari dua teori, yaitu teori pemegang saham (*shareholding theory*), dan teori stakeholder (*stakeholder theory*) (Sugeng Suroso, 2022).

Menurut *Institute for Corporate Governance Indonesia* (IICG) dalam Correa & Garcia (2020) mendefinisikan GCG sebagai :

”Suatu proses dan struktur yang diterapkan dalam pengelolaan suatu perusahaan dengan tujuan utama meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan petaruh lainnya. Selain untuk memenuhi kepentingan pemegang saham, GCG juga harus menjamin keberlanjutan. Definisi ini menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan dapat digunakan untuk membangun kepercayaan, menjalin kerja sama, dan menciptakan visi bersama di antara semua pihak yang

terlibat dalam suatu perusahaan sehingga permasalahan keagenan dapat diantisipasi. Praktik *Good Corporate Governance* dalam pengungkapan Laporan Keberlanjutan dinilai sangat diperlukan”

Tumbull Report (1999) dalam Effendi (2016:2) mendefinisikan *corporate governance* :

“Sebagai suatu sistem pengendalian internal perusahaan yang memiliki tujuan utama mengelola risiko yang signifikan guna memenuhi tujuan bisnisnya melalui pengamanan asset perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam jangka panjang.”

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) (2015:9) mendefinisikan *corporate governance* sebagai :

“*Corporate governance involves a set of relationship between a company’s, management, it’s board its shareholder and stakeholder. Corporate governance also provides the structure through which the objective of the company are set, and the means of attaining those objectives and monitoring performance are determined.*

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka yang dimaksud dengan tata kelola perusahaan secara sederhana adalah pengelolaan suatu perusahaan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan independensi, suatu sistem yang ditujukan untuk pengelolaan yang profesional. Tata kelola perusahaan dapat mendorong terbentuknya pola kerja manajemen yang bersih, transparan, profesional, efektif, dan efisien. Penerapan *Good Corporate Governance* diperlukan untuk memastikan bahwa perusahaan dikelola dengan cara yang dapat diandalkan, dan tidak ada kompromi terhadap kepentingan (*stakeholder*). Apabila *Corporate Governance Disclosure* tersebut dapat berjalan dengan efektif dan efisien, maka seluruh proses aktivitas perusahaan akan berjalan

dengan profesional, sehingga hal – hal yang berkaitan dengan perusahaan yang bersifat finansial dan non finansial akan tetap berjalan dengan profesional.

2.1.2.2 Tujuan *Good Corporate Governance*

Tujuan utama Tata Kelola Perusahaan yang baik adalah untuk melindungi hak dan kepentingan pemegang saham perusahaan. Selain itu, penting juga untuk mengelola sumber daya perusahaan dengan lebih efektif dan efisien. Tata Kelola Perusahaan yang baik juga dapat meningkatkan investasi nasional, sehingga dalam kepemilikan dapat berjalan dengan baik. Secara teoritis penerapan *Good Corporate Governance* dapat meningkatkan nilai pemegang saham dengan meningkatkan keberhasilan usaha perusahaan, dan mengurangi risiko yang mungkin ditanggung oleh dewan komisaris. Untuk keputusan yang dibuat sendiri merupakan kepentingan, dan dapat meningkatkan akuntabilitas perusahaan (Mirza, 2020).

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara tentang Badan Usaha Milik Negara. Penerapan *Good Corporate Governance* dalam PER-01/MBU/2011 yaitu :

1. Mengoptimalkan nilai – nilai BUMN agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional, sehingga mampu mempertahankan keberadaannya dan hidup berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan BUMN.
2. Mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Organ Persero/Organ Perum.

3. Mendorong agar Organ Persero/Organ Perum dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang – undangan, serta kesadaran akan adanya tanggungjawab sosial BUMN terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan disekitar BUMN.
4. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional.
5. Meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.

2.1.2.3 Prinsip *Good Corporate Governance*

Dalam upaya penerapan prinsip GCG, dimensi hukum merupakan salah satu dokumen penting untuk kelanjutan penerapannya. Oleh karena itu, pemerintah membentuk Komite Nasional Kebijakan Pemerintahan (KNKG), dapat didefinisikan sebagai berikut (Chan Chandra Leonardi, 2019) :

1. Transparansi (*transparancy*)

Keterbukaan di dalam sebuah perusahaan untuk melaksanakan proses pengambilan keputusan dan dapat diimplementasikan, perusahaan harus menyediakan informasi yang relevan, memadai, jelas, tepat waktu, dan akurat. Informasi ini berupa seperti visi dan misi perusahaan, kondisi keuangan perusahaan, informasi pengambilan keputusan, informasi mengenai sasaran, strategi perusahaan, kompensasi, dan informasi mengenai kinerja perusahaan dan kejadian – kejadian yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan, struktur kepemilikan saham, sistem manajemen resiko, dan sistem pengendalian internal. Keterbukaan telah diterapkan namun tidak sepenuhnya oleh perusahaan dalam hal pemberian sosialisasi visi dan misi perusahaan kepada karyawan yang baru masuk dan terus diingatkan dengan training pada setiap minggu. Namun, visi dan misi perusahaan hanya diketahui oleh internal perusahaan saja dan visi misi belum terdapat di website perusahaan. Perusahaan dalam keterbukaan

pengambilan keputusan, telah diterapkan di mana tiap organisasi sudah mengetahui bagaimana pengambilan keputusan di perusahaan ini. Jika ada suatu permasalahan biasanya terdapat meeting terlebih dahulu untuk mencari jalan keluar masalah tersebut dan general manager akan menginformasikan kepada pihak terkait untuk memberikan wewenang dalam pengambilan keputusan.

2. Akuntabilitas (*accountability*)

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Perusahaan juga harus dikelola secara tepat, terukur, dan sesuai dengan kepentingan pemegang saham. Untuk melakukan implementasi prinsip akuntabilitas perusahaan harus penetapan rincian tugas dan tanggung jawab masing – masing karyawan, struktur organisasi, cara mengetahui hasil kinerja, standar operasional perusahaan (SOP), audit perusahaan, cara penempatan karyawan perusahaan dan juga cara perusahaan memberikan promosi kepada karyawan, serta kode etik yang dipakai dalam kegiatan perusahaan, dan sistem pengendalian internal.

3. Responsibilitas (*responsibility*)

Kegiatan operasional perusahaan yang berkaitan dengan peraturan dan perundang – undang pemerintah, tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat, lingkungan sekitar, kewajiban perusahaan, jaminan berupa tanggung jawab perusahaan terhadap karyawan, upah minimum bagi karyawan, sistem insentif kepada karyawan dan hak cuti karyawan. Perusahaan telah menerapkan prinsip tanggung jawab terkait dengan kegiatan operasional sesuai peraturan pemerintah. Perusahaan memenuhi persyaratan jam waktu kerja yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dan perusahaan juga membayar persyaratan BPJS. Perusahaan juga telah menerapkan prinsip tanggung jawab dalam hal tanggung jawab ke masyarakat dan lingkungan sekitar sehingga kelangsungan bisnis terjadi dalam jangka panjang serta mendapat pengakuan sebagai (*Good Corporate Governance*).

4. Kemandirian (*independency*)

Untuk menerapkan prinsip – prinsip *Good Corporate Governance* perusahaan harus dikelola secara independen perusahaan harus melakukan pengelolaan secara mandiri atau independen sehingga masing – masing organ perusahaan tidak bisa saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Perusahaan telah menerapkan prinsip kemandirian dalam aspek menghindari *conflict of interest*. Tiap organ perusahaan selalu mengutamakan pekerjaan dengan kepentingan perusahaan merupakan kepentingan utama. Selain itu, tiap organ yang ada di perusahaan adalah berdasarkan profesional tanpa memiliki hubungan

dengan pemilik perusahaan atau kepentingan – kepentingan tertentu. Selain itu, pada pemegang saham perusahaan hingga saat ini juga belum pernah terdapat perbedaan kepentingan.

5. Kewajaran (*fairness*)

Perusahaan telah menerapkan prinsip kewajaran dan kesetaraan dalam hal pemberian pendapat yang sama. Tiap stakeholder diberikan kesempatan yang sama untuk memberikan kritik dan pendapat dalam lingkup pengaruhnya. Pemilik perusahaan juga sangat terbuka terkait dalam percakapannya untuk memudahkan komunikasi dengan lancar. Perusahaan juga memberikan kesempatan berkarir yang sama kepada setiap orang berdasarkan filter kualifikasi dan kompetisi orang tersebut dan tidak memandang agama, suku, gender, golongan, dan ras serta fisik. Namun, terkait dengan gender ada pekerjaan yang memang hanya dikerjakan oleh laki – laki contohnya engineering karena harus bekerja hingga larut malam. Selain itu, organ perusahaan juga dapat meningkatkan jenjang karirnya jika memang dianggap berpotensi melalui penilaian yang dilakukan dan biasanya akan diberikan reward melalui program best employee perusahaan berupa kenaikan jabatan, gaji, perpanjangan kontrak.

2.1.2.4 Pengertian *Corporate Governance Disclosure*

Corporate Governance Disclosure adalah suatu sistem yang dibentuk untuk mengelola dan mengatur perusahaan. Sistem ini membatasi kebebasan manajemen dalam melakukan manajemen laba. Pengungkapan tata kelola perusahaan yang baik akan memberikan sinyal kepada pemegang saham bahwa laba yang dihasilkan perusahaan baik dan berkualitas. Hal ini dapat disebabkan oleh adanya pengungkapan tata kelola perusahaan yang baik akan memotivasi dan mengendalikan manajemen dalam menjalankan segala aktivitas operasional perusahaan. Oleh karena itu, dampak yang ditimbulkan akibat adanya *Corporate Governance Disclosure* yang baik di suatu perusahaan akan mempengaruhi hubungan manajemen laba dengan nilai perusahaan (Winarta. et al, 2019).

Tata kelola perusahaan bertujuan untuk mengurangi konflik antar institusional melalui penggunaan berbagai agen seperti kepemilikan saham institusional, kepemilikan manajemen, komite audit dan komisaris independen. Hal ini diharapkan dapat mengurangi aktivitas manajemen laba yang dilakukan manajemen dan berdampak pada peningkatan kualitas laba perusahaan. Namun dalam penelitian ini tata kelola perusahaan menggunakan pengungkapan yang mengacu pada SE OJK Nomor 16/SE OJK.04/2021 (Nanang & Tanusdjaja, 2019).

Menurut Tsabita Alifia Fathia & Marsono (2023) *Corporate Governance Disclosure* adalah pengaruh dari berbagai perundang – undangan tata aturan hukum, pasar, serta usaha keseluruhan anggota mengenai penataan pengelolaan organisasi, yang tergolong dari direktur, manajer, auditor, konsultan hukum dan keuangan yang mampu mewujudkan mekanisme *check and balances* dengan maksud mewujudkan dan melakukan peningkatan penilaian pemegang saham, serta mampu melakukan perlindungan terhadap berbagai kepentingan *stakeholder* lainnya. Mekanisme penting untuk mendapatkan kepastian bahwa kegiatan *corporate governance* sesuai dengan hukum dalam hal transparansi dan akuntabilitas adalah melalui pengungkapan tata kelola perusahaan.

Menurut (Herbert & Agwor, 2021) *Corporate governance* melibatkan keseluruhan sistem regulasi hukum, budaya, dan kelembagaan yang menentukan batasan kegiatan perusahaan publik, transparansi dan akuntabilitas mengenai tata kelola perusahaan dapat dicapai dengan *corporate governance disclosure*. Sesuai dengan teori sinyal, manajer yang berpikiran etis dan mempunyai informasi sebagai seorang insider akan cenderung menggunakan *corporate governance disclosure*

untuk memberi data informasi terhadap pemangku yang mempunyai kepentingan tentang praktik tata kelola perusahaan mereka sehingga meningkatkan reputasi perusahaan.

Corporate Governance menurut Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-2/MBU/03/2023 adalah suatu tata cara pengelolaan perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparancy*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*). Sedangkan menurut (Savitri, 2019) *Corporate Governance* dapat diartikan sebagai suatu sistem pengendalian internal perusahaan yang memiliki tujuan utama untuk mengelola risiko yang signifikan sehingga perusahaan dapat memenuhi tujuan bisnisnya melalui tata kelola dan sistem bekerja dengan baik dalam perusahaan, pengamanan asset perusahaan dan meningkatkan nilai investasi dalam jangka menengah maupun dalam jangka panjang.

Yang dimaksud dengan "*governance*" adalah pengendalian, sehingga tata kelola perusahaan mengacu pada tata kelola atau pengendalian suatu organisasi perusahaan. Tata kelola perusahaan berkaitan dengan standar perilaku dan perilaku yang diharapkan dari direktur dan eksekutif senior lainnya (termasuk manajer keuangan) dalam mengarahkan dan mengendalikan urusan perusahaan (Goel, 2020).

Corporate Governance Disclosure adalah sebagai instrument yang digunakan untuk mengungkapkan informasi-informasi tata kelola perusahaan.

Pengungkapan tata kelola adalah cara bagi perusahaan untuk mengurangi asimetri informasi antara manajemen dan pasar. Seperti diketahui bahwa manajemen, yang menjalankan perusahaan, harus memiliki banyak informasi dan kontrol atas kegiatan operasional perusahaan. Informasi yang asimetris antara manajemen dan pasar, menyebabkan berkurangnya tingkat kepercayaan pasar terhadap manajemen (Firmansyah et al., 2021). Perusahaan menggunakan laporan tahunan sebagai sarana untuk mengungkapkan informasi tata kelola perusahaan.

Sedangkan menurut (Majidah & Habiebah Ummie, 2019) *Corporate Governance Disclosure*, menjadi instrumen yang digunakan perusahaan sebagai pengungkapan informasi mengenai tata kelola perusahaan. *Corporate Governance Disclosure* bertujuan mengelola risiko dalam memenuhi tujuan perusahaan. Untuk memberikan keyakinan kepada investor bahwa perusahaan dapat memberikan keuntungan.

Berdasarkan beberapa penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa *Corporate governance disclosure* adalah suatu sistem pengelolaan atau pengendalian perusahaan yang dirancang untuk memenuhi tujuan perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparancy*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*).

2.1.2.5 Pengukuran *Corporate Governance Disclosure*

Corporate governance disclosure merupakan bagian dari laporan tahunan perusahaan. Dasar pengungkapan laporan keuangan oleh manajemen kepada

pemegang saham dapat menyampaikan laporan periodik kepada principal mengenai usaha yang dijalankan dan principal akan menilai kinerjanya melalui laporan keuangan tersebut. Laporan keuangan merupakan sarana transparansi dan akuntabilitas manajemen kepada principal dan mendasari penelitian *corporate governance* untuk memberikan bukti sejauh mana informasi yang diberikan dalam sistem akuntansi mengurangi masalah keagenan dan meningkatkan kinerja perusahaan melalui pemantauan atau pengawasan kinerja manajemen terhadap para stakeholder dan pemangku kepentingan lainnya, sehingga manajemen lebih fokus dalam mencapai sasarannya.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini *corporate governance disclosure* diukur melalui *Content Analysis* yang telah dikembangkan oleh para peneliti untuk mengidentifikasi item – item apa saja yang merupakan *corporate governance*. Analisis ini dilakukan dengan cara menganalisis laporan tahunan perusahaan untuk menjawab 120 item rekomendasi yang diajukan dalam Kode Tata Kelola Perusahaan Inggris pada penelitian Elmagrhi et al., (2018) yang dibagi menjadi 5 pilar utama yaitu kepemimpinan (8 item), efektivitas (37 item), akuntabilitas (36 item), praktik remunerasi (22 item) dan hubungan baik dengan pemegang saham (17 item). Kelebihan dari penggunaan indeks yang sesuai dengan Kode Gabungan Inggris adalah lebih menangkap konsep tata kelola perusahaan pada kondisi sesungguhnya karena dalam Kode Gabungan Inggris tersebut diatur prinsip – prinsip tata kelola perusahaan yang lebih luas, jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yang bersifat parsial atau hanya menggunakan variabel ukuran dewan komisaris, komite audit, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional.

Berikut adalah rincian dari indikator *content analysis* dari Kode Gabungan Inggris agar dapat menilai laporan tahunan perusahaan :

Tabel 2. 1
Indeks *Corporate Governance Disclosure*

Tema CGI	CGI Item	Scoring
Sub – Indeks Kepemimpinan :		
(i) Struktur Dewan	1. Keanggotaan Dewan	0 – 1
	2. Peran Ganda	0 – 1
	3. Frekuensi Rapat Dewan	0 – 1
	4. Kehadiran Individu Direktur Rapat Dewan	0 – 1
	5. Kehadiran Mayoritas Rapat Dewan	0 – 1
	6. Pernyataan tentang Independensi Ketua	0 – 1
	7. Penunjukan Direktur Independensi Senior	0 – 1
	8. Peran Dewan dan Manajer	0 – 1
Sub – Indeks Efektifitas		
(ii) Dewan dan Direktur	9. Ketua Dewan adalah Direktur Non-Eksekutif	0 – 1
	10. Independensi Ketua	0 – 1
	11. Komposisi Dewan	0 – 1
	12. Klasifikasi Direktur	0 – 1
(iii) Evaluasi Dewan dan Direktur	13. Proses Penilaian Dewan/Eksekutif	0 – 1
	14. Evaluasi Kinerja Dewan	0 – 1
	15. Evaluasi Kinerja Individu Direktur	0 – 1
	16. Evaluasi Kinerja Komite Dewan	0 – 1
	17. Evaluasi Kinerja CEO	0 – 1
	18. Evaluasi Kinerja Ketua	0 – 1
	19. Evaluasi yang difasilitasi secara eksternal	0 – 1
(iv) Pemilihan Kembali Anggota Dewan	20. Proses Pemilihan Kembali Dewan/Eksekutif	0 – 1
	21. Nama Direktur	0 – 1
	22. Rincian Biografi Direktur	0 – 1
	23. Rincian Direktur Lainnya	0 – 1
	24. Pengalaman Direktur	0 – 1

(v)	Program Induksi dan Pelatihan	25. Induksi dan Pelatihan diberikan kepada semua Direktur	0 – 1
		26. Rincian Program Pelatihan	0 – 1
(vi)	Bebas Konsultasi Hukum	27. Bebas Akses ke Konsultasi Hukum Independen	0 – 1
(vii)	Perdagangan dan Transaksi Orang Dalam	28. Hubungan Direktur/ Pejabat dan Sekuritas	0 – 1
		29. Direktur/Pejabat berbagi urusan	0 – 1
(viii)	Nominasi Panitia	30. Keberadaan	0 – 1
		31. Kerangka Acuan	0 – 1
		32. Keanggotaan	0 – 1
		33. Komposisi	0 – 1
		34. Independensi Ketua	0 – 1
		35. Frekuensi Pertemuan Nominasi Panitia	0 – 1
		36. Kehadiran Anggota Individu dalam Rapat Nominasi Panitia	0 – 1
		37. Kehadiran Mayoritas Pertemuan Nominasi Panitia	0 – 1
		38. Evaluasi Panitia sebagai Kelompok	0 – 1
		39. Evaluasi Ketua	0 – 1
		40. Evaluasi Anggota Individu	0 – 1
(ix)	Kantor Sekertaris Perusahaan	41. Keberadaan	0 – 1
		42. Identitas	0 – 1
		43. Kerangka Acuan	0 – 1
		44. Kehadiran Rapat Dewan	0 – 1
		45. Catatan Kehadiran Rapat	0 – 1
Sub – Indeks Akuntabilitas			
(x)	Akuntabilitas Dewan	46. Menyiapkan Laporan Tahunan dan Akun Tahunan	0 – 1
		47. Status Kelangsungan Hidup Perusahaan	0 – 1
(xi)	Komite Audit	48. Keberadaan	0 – 1
		49. Meninjau Sistem Manajemen Risiko	0 – 1
		50. Kerangka Acuan	0 – 1
		51. Keanggotaan	0 – 1
		52. Komposisi	0 – 1
		53. Independensi Ketua	0 – 1
		54. Frekuensi Pertemuan Komite Audit	0 – 1

	55. Kehadiran Anggota Individu dalam Rapat Komite Audit	0 – 1
	56. Kehadiran Mayoritas Pertemuan Komite Audit	0 – 1
	57. Ruang Lingkup dan Tanggung Jawab Auditor Eksternal	0 – 1
	58. Rapat Audit Eksternal	0 – 1
	59. Rapat Pribadi Audit Eksternal	0 – 1
	60. Biaya Audit	0 – 1
	61. Evaluasi Komite Audit sebagai Kelompok	0 – 1
	62. Evaluasi Ketua	0 – 1
	63. Evaluasi Anggota Individu	0 – 1
(xii) Manajemen Resiko	64. Resiko Aktual dan Potensial	0 – 1
	65. Evaluasi Resiko	0 – 1
	66. Kebijakan Manajemen Resiko	0 – 1
	67. Komite Manajemen Resiko	0 – 1
	68. Kerangka Acuan	0 – 1
	69. Keanggotaan	0 – 1
	70. Komposisi	0 – 1
	71. Frekuensi Pertemuan Komite Manajemen Resiko	0 – 1
	72. Kehadiran Anggota Individu dalam Rapat Komite Manajemen Resiko	0 – 1
	73. Kehadiran Mayoritas Pertemuan Komite Manajemen Resiko	0 – 1
	74. Evaluasi Komite Resiko sebagai Kelompok	0 – 1
	75. Evaluasi Ketua	0 – 1
	76. Evaluasi Anggota Individu	0 – 1
(xiii) Audit Internal dan Kontrol	77. Kebijakan dan Prosedur Pengendalian Internal	0 – 1
	78. Keberadaan Unit Audit Internal	0 – 1
	79. Pertemuan Tahunan dengan Komite Audit	0 – 1
	80. Pertemuan Pribadi dengan Komite Audit	0 – 1
	81. Tinjauan Resiko dan Sistem Pengendalian Internal	0 – 1
Sub – Indeks Remunerasi		
(xiv) Komite Remunerasi	82. Keberadaan	0 – 1
	83. Keanggotaan	0 – 1

	84. Komposisi	0 – 1
	85. Independensi Ketua	0 – 1
	86. Frekuensi Pertemuan Komite Remunerasi	0 – 1
	87. Kehadiran Anggota Individu dalam Rapat Komite Remunerasi	0 – 1
	88. Kehadiran Mayoritas Pertemuan Komite Remunerasi	0 – 1
	89. Evaluasi Ketua	0 – 1
	90. Evaluasi Anggota Individu	0 – 1
	91. Kerangka Acuan	0 – 1
	92. Remunerasi CEO	0 – 1
	93. Remunerasi Direktur Lain	0 – 1
	94. Remunerasi Tunai Semua Direktur	0 – 1
	95. Remunerasi NED	0 – 1
	96. Remunerasi Non-Tunai Semua Direktur	0 – 1
	97. Kebijakan Gaji Eksekutif	0 – 1
	98. Kepentingan Kepemilikan Direktur	0 – 1
	99. Komposisi Remunerasi ED	0 – 1
	100. Konsultan Remunerasi	0 – 1
	101. Remunerasi semua Direktur dengan Nama	0 – 1
	102. Rencana Insentif Jangka Panjang Direktur	0 – 1
	103. Filosofi Remunerasi Direksi	0 – 1
Sub – Indeks Hubungan dengan Pemegang Saham	104. Kewajiban kepada Pemegang Saham	0 – 1
	105. Pemberitahuan tentang Rapat Umum Tahunan	0 – 1
	106. Pengungkapan Hak Pemegang Saham	0 – 1
	107. Nama – nama Anggota Dewan yang hadir dalam RUPS	0 – 1
	108. Kehadiran Ketua Dewan dalam RUPS	0 – 1
	109. Ketua NC hadir dalam RUPS	0 – 1
	110. Kehadiran Ketua RC di RUPS	0 – 1
	111. Kehadiran Ketua AC pada RUPS	0 – 1
	112. Kehadiran Ketua RMC di RUPS	0 – 1
	113. Aktivesme Pemegang Saham	0 – 1

	114. Kebijakan Pemungutan Suara Proxy	0 – 1
	115. Kewajiban kepada masyarakat/komunitas	0 – 1
	116. Masalah Lingkungan	0 – 1
	117. Masalah Sosial	0 – 1
	118. Program Pelatihan dan Pendidikan Karyawan	0 – 1
	119. Kesehatan dan Keselamatan	0 – 1
	120. Kode Etik	0 – 1

Sumber : Elmagrhi et al., (2018)

Pemberian skor dilakukan dengan memberikan nilai 1 untuk perusahaan yang telah menerapkan salah satu rekomendasi yang telah ditetapkan oleh Kode Gabungan Inggris dan memberikan nilai 0 untuk perusahaan yang belum menerapkan rekomendasi tersebut. Data terkait penerapan rekomendasi tata kelola perusahaan oleh perusahaan didapatkan dari laporan tahunan perusahaan. Adapun formula untuk mengukur prinsip – prinsip tata kelola perusahaan adalah sebagai berikut:

$$ICGD = \frac{\text{Total item Corporate Governance Disclosure}}{\text{Total Score Item Rekomendasi}}$$

Sumber : Elmagrhi et al., (2018)

2.1.3 *Water Disclosure*

2.1.3.1 *Pengertian Water Disclosure*

Water Disclosure menyiratkan bahwa perusahaan melaporkan informasi kepada pemangku kepentingan terkait status pengelolaan sumber daya air, termasuk penerapan strategi pengelolaan sumber daya air dan dampaknya terhadap perusahaan lain (CEO Water Mandate, 2014; Zhou et al., 2018).

Menurut (ASEAN CSR Network oleh Loh dan Thomas, 2018) *Water Disclosure* adalah perusahaan yang merupakan tindakan pengumpulan data tentang keadaan pengelolaan air suatu perusahaan saat ini, menilai dari informasi yang relevan terhadap perusahaan, mengembangkan respon strategis, dan melaporkan informasi kepada para pemangku kepentingan. *Water Disclosure* merupakan bagian penting dari upaya pengelolaan air oleh perusahaan dan pengembangan keberlanjutan yang berhubungan dengan air secara umum.

Water Disclosure bertujuan untuk memberikan informasi finansial atau material yang bermanfaat kepada pemangku kepentingan terkait dengan kegiatan pengelolaan sumber daya air oleh perusahaan yang merupakan tindakan transmisi informasi. Selain itu, *water disclosure* dapat membantu perusahaan untuk memahami risiko air, informasi biaya, dan peluang pendapatan, serta memberikan dasar informasi untuk penerapan pengelolaan sumber daya air yang efektif (Liu Chengyun et al., 2021).

2.1.3.2 Tujuan *Water Disclosure*

Tujuan dari pengungkapan air perusahaan adalah untuk memberikan informasi keuangan atau kuantitatif lainnya yang berguna terkait dengan kegiatan pengelolaan air perusahaan kepada pemangku kepentingan (Zhou dkk., 2018). *Water Disclosure* dapat digunakan untuk menghindari risiko air dan mengurangi asimetri informasi sehingga dapat meningkatkan kepercayaan investor dan kreditur pada perusahaan yang akhirnya bisa mengatasi masalah keuangan perusahaan. Tujuan *water disclosure* untuk mengumpulkan informasi yang terkait air, seperti pengambilan air berdasarkan sumber, sumber air, pengelolaan air, dan pengelolaan

lingkungan. Pengungkapan air ini bertujuan untuk memperhatikan dampaknya, bertanggungjawab, dan mengungkapkan informasi terkait manajemen air (Rohma Fitria & Venusita Lintang, 2021).

Menurut (CEO Water Mandate, 2014) pengungkapan air perusahaan semakin termotivasi untuk mengelola risiko dan dampak negatif air secara proaktif dan komprehensif, memperoleh banyak manfaat dari tindakan ini diantaranya adalah :

1. Memastikan izin hukum dan sosial bagi perusahaan untuk beroperasi di lokasi tertentu.
2. Mencegah terhadap krisis operasional yang diakibatkan ketersediaan, pasokan, dan kualitas air atau masukan yang bergantung pada air secara spesifik pada lokasi tertentu.
3. Memperoleh keunggulan dibandingkan pesaing karena persepsi pemangku kepentingan yang menganggap bahwa perusahaan menggunakan sumber daya alam secara bertanggung jawab dan dampak negatif yang minimal terhadap manusia dan lingkungan.
4. Meyakinkan investor dan pasar bahwa operasional perusahaan akan terus menguntungkan dengan mengamankan ketersediaan air untuk operasi dan mengurangi biaya terkait air.
5. Menjaga nilai perusahaan berdasarkan pembangunan berkelanjutan, berkeadilan, dan berkontribusi terhadap kesejahteraan wilayah sungai, lingkungan, dan masyarakat di wilayah tempat perusahaan beroperasi.

2.1.3.3 Pengukuran *Water Disclosure*

Dalam Penelitian ini, *Water Disclosure* Perusahaan diukur dengan menggunakan indeks penilaian dari penelitian Scale (Zeng, 2017) yang ditunjukkan pada Tabel 2.2 untuk menilai *Water Disclosure* perusahaan. Sebuah perusahaan menerima 1 poin untuk setiap pengungkapan. Oleh karena itu, skor indeks pengungkapan air tahunan perusahaan sampel adalah antara 0 dan 27. Semakin

tinggi skor indeks pengungkapan air perusahaan, semakin lengkap informasi terkait air yang diungkapkan perusahaan.

Berikut adalah rincian mengenai indeks pengungkapan air yang digunakan dalam penelitian ini agar dapat menilai laporan tahunan perusahaan :

Tabel 2. 2

Indeks *Water Disclosure*

Pengungkapan Air menggunakan Indeks Scale

Klasifikasi	Kode	Item Pengungkapan
Indikator Kualitatif		
	A1	Sumber air dimana perusahaan berada
	A2	Pernyataan Kepatuhan terhadap hukum/peraturan
	A3	Deskripsi status, tren, dan hasil pengelolaan air
	A4	Penggunaan Air
	A5	Jenis Air Limbah yang dibuang
	A6	Risiko Air
	A7	Rencana Manajemen Air
	A8	Kerja sama strategis dengan pihak lain dalam pengelolaan air
	A9	Departemen khusus lingkungan/tanggung jawab sistem
	A10	Produk/Layanan yang bersih dan efisien
	A11	Kerja sama dengan pemasok
	A12	Berkomitmen untuk penggunaan air yang efisien
	A13	Komunikasi dengan pemangku kepentingan tentang masalah air
	A14	Data sumber daya air yang disetujui oleh pihak ketiga
	A15	Menggunakan Guidelines for Sustainability Reporting (GRI)
Indikator Kuantitatif		
	B1	Permintaan Air
	B2	Harga Air dan Biaya Air
	B3	Kualitas dan standar pasokan air keran
	B4	Konsumsi Air
	B5	Pembuangan Air Limbah
	B6	Kualitas dan standar air limbah
	B7	Biaya Limbah dan Pembatasan Limbah

	B8	Kerusakan Lingkungan akibat pembuangan air limbah
	B9	Penggunaan investasi air yang efisien
	B10	Daur ulang air, efisiensi daur ulang air
	B11	Kinerja manajemen air
	B12	Akses ke subsidi lingkungan, insentif keuangan khusus

Sumber : Zhou (2017)

Metode pengukuran yang digunakan adalah *content analysis*. Metode ini dilakukan dengan cara membaca *annual report* atau *sustainability report* perusahaan, perusahaan sampel untuk menemukan sejauh mana perusahaan melakukan *Water Disclosure*. Perusahaan yang melakukan pengungkapan item akan diberikan skor atas kualitas pengungkapan air perusahaan sebagai berikut :

0 = tidak mengungkapkan apa pun yang berhubungan dengan air.

1 = melakukan pengungkapan.

Dengan Demikian, untuk mengetahui tingkat pengungkapan indeks kinerja maka dilakukan perhitungan atas item – item yang diungkapkan dalam *water disclosure* dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Pengungkapan} = \frac{\text{total poin item diperoleh}}{\text{total poin item maksimum}} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Pengungkapan} = \frac{\text{total poin item diperoleh}}{27} \times 100\%$$

2.1.4 Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti – peneliti terdahulu yang menjadi faktor – faktor yang mempengaruhi *Water Disclosure* dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2. 3
Penelitian Terdahulu

No	Nama Penelitian dan Tahun	Judul Penelitian	Kesimpulan
1	Noha Alessa, John Yaw Akparep, Inusah Sulemana dan Andrew Osei Agyemang (2024)	<i>Does Stakeholder Pressure influence firms environmental, social and governance (ESG) disclosure? Evidence from Ghana</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tekanan pemangku kepentingan terdapat pengaruh signifikan dengan meningkatkan kinerja pengungkapan lingkungan keberlanjutan.
2	Silvana dan Khomsyiah (2023)	Pengaruh <i>Stakeholder Pressure</i> dan Kinerja Keuangan Perusahaan Terhadap <i>Sustainability Report Quality</i>	Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdapat pengaruh positif pada industri sensitif lingkungan dan kinerja perusahaan terhadap <i>sustainability report quality</i> , sementara industri dekat konsumen, industri berorientasi karyawan, dan industri berorientasi investor tidak memiliki pengaruh terhadap <i>sustainability report quality</i> . Hal ini dapat disimpulkan bahwa semakin sensitif perusahaan dengan lingkungan dan termasuk ke dalam industri high profile, maka akan memperoleh tekanan yang lebih tinggi dari lingkungan untuk mengungkapkan aktivitasnya.
3	Yulia Eka Riyanti dan Etty Murwaningsari (2023)	<i>The Role Of Stakeholder Pressure in Moderating The</i>	Hasil Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran tekanan pemangku kepentingan dalam memoderasi pengaruh investasi

		<i>Effect Of Green Investment, Corporate Governance And Corporate Growth On Carbon Emissions Disclosure</i>	hijau yang sangat signifikan terhadap tata kelola perusahaan dan pertumbuhan pengungkapan informasi air.
4	Sriningsih dan Indah Fajarini Sri Wahyuningrum (2022)	<i>Pengaruh Comprehensive Stakeholder Pressure dan Good Corporate Governance terhadap Kualitas Sustainability Report</i>	Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah diharapkan dapat memperjelas peraturan mengenai pengungkapan laporan keberlanjutan dan mendorong pengungkapan GRI konten sektoral dalam laporan keberlanjutan. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan scoring tersebut metode untuk mengukur kualitas laporan keberlanjutan dengan pengungkapan lingkungan dan alat ukur lainnya untuk mengukurnya pengaruh tekanan pemangku kepentingan terhadap kualitas laporan keberlanjutan.
5	Candra Widi Sari, I Putu Sudana, Ni Made Dwi Ratnadi, dan Ni Ketut Rasmini (2022)	<i>Stakeholder Pressure and Environmental Performance of Manufacturing Companies on the Indonesian Stock Exchange</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa <i>Stakeholder Pressure</i> yang diprosikan dengan tekanan pemegang saham berpengaruh signifikan terhadap kinerja lingkungan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
6	Zhang Miaomiao (2021)	<i>Water Disclosure and financial reporting quality</i>	Hasil Penelitian tersebut menunjukkan bahwa keterbukaan pengungkapan

		<i>for social changes: Empirical evidence from China</i>	informasi air telah menjadi topik hangat dalam beberapa tahun terakhir, dan memiliki pengaruh signifikan terhadap para pemangku kepentingan.
7	Galuh Kirana Nugraheni, Shinta Widyastuti, dan Rahmasari Fahria (2021)	Pengaruh Tata Kelola Perusahaan, Ukuran Perusahaan, dan Keterbukaan Massa Terhadap Pengungkapan Informasi Lingkungan	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan informasi lingkungan.
8	Claudia Leonirda Lulu (2020)	<i>Stakeholder Pressure and The Quality Of Sustainability Report : Evidence From Indonesia</i>	Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa tekanan pemangku kepentingan dan tekanan lingkungan, tekanan konsumen mempunyai pengaruh positif pada kualitas laporan keberlanjutan dan pencemaran lingkungan.
9	Salvatore Esposito De Falco, Giuseppe Scandurra, dan Antonio Thomas (2020)	<i>How Stakeholders affect the pursuit of the Environmental, Social, and Governance. Evidence from innovative small and medium enterprises.</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tekanan pemangku kepentingan memberikan pengaruh positif yang lebih besar terhadap kinerja lingkungan dan sosial.
10	Rini Suharyani, Ihyaul Ulum, dan	Pengaruh Tekanan Stakeholder Dan	Hasil Penelitian ditemukan bahwa tekanan pemangku kepentingan berpengaruh positif

	Ahmad Waluya Jati (2019)	<i>Corporate Governance Terhadap Kualitas Sustainability Report</i>	signifikan terhadap kualitas laporan keberlanjutan dan tata kelola perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keberlanjutan.
11	Zhou et al (2018)	The impact of Water information Disclosure on the cost of capital: An empirical study of China's capital market.	Hasil Penelitian tersebut menunjukkan bahwa informasi pengungkapan air berpengaruh terhadap <i>stakeholder pressure</i> . Semakin banyak pengungkapan air, semakin menaruh perhatian pada sederet persoalan sumber daya air itu yang dihadapi perusahaan. Sebagai sarana penting untuk mentransmisikan sinyal antar perusahaan dan keterbukaan informasi mengenai air dapat membantu perusahaan mencapai lebih banyak hal pandangan positif dari para pemangku kepentingan.
12	Zhifang Zhou, Liemei Liu, Huixiang Zeng, Xiaohong Chen (2018)	Does <i>Water Disclosure</i> cause a rise in Corporate risk – taking : evidence from Chinese high water – risk industrie	Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa <i>Water Disclosure</i> berpengaruh negatif dengan pengambilan risiko perusahaan, dan hubungan tersebut antara keduanya berbeda tergantung pada perbedaan hak milik dan ketinggian relatif air keterbukaan informasi. Lebih lanjut menemukan bahwa, legitimasi organisasi berperan signifikan pada dampak pengungkapan air terhadap pengambilan risiko perusahaan dan tata kelola perusahaan.

13	Valentina Lagasio dan Nicola Cucari (2018)	<i>Corporate Governance and environmental social governance disclosure: A meta-analytical review</i>	Hasil Penelitian ini menunjukkan tentang pengaruh tata kelola perusahaan terhadap lingkungan, sosial, dan pengungkapan tata kelola, dalam situasi di mana pengungkapan informasi dilakukan sukarela tetapi tidak diskresioner.
----	--	--	--

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir pada penelitian ini mengacu pada kajian pustaka dan penelitian terdahulu mengenai faktor – faktor yang mempengaruhi *Water Disclosure*. Hal ini mendorong peneliti untuk menggunakan beberapa faktor yang mempengaruhi *Water Disclosure* yaitu *Stakeholder Pressure* dan *Corporate Governance Disclosure*.

2.2.1 Pengaruh *Stakeholder Pressure* Terhadap *Water Disclosure*

Pemangku kepentingan menjadi pemegang saham seperti yang ditemukan terdapat hubungan yang positif antara jumlah pemegang saham dan informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan. Selain itu, dapat mempengaruhi tingkat pengungkapan. Pelaporan keberlanjutan merupakan bentuk pertanggung jawaban yang menyediakan berbagai informasi penting bagi investor dan calon investor sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi pada perusahaan. Mayoritas pemegang saham ingin tahu apakah perusahaan akan bertahan dalam jangka panjang untuk reputasi perusahaan. Pemegang saham cenderung membuat keputusan yang akan meningkatkan tindakan ekonomi, sosial dan lingkungan perusahaan. Oleh karena itu, semakin tinggi tekanan dari pemegang saham, maka transparansi perusahaan dalam mengungkapkan informasi akan

semakin lengkap, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan pemegang saham dengan meningkatkan transparansi *sustainability report*.

Suatu perusahaan dapat dipertahankan dengan menerima umpan balik positif dari investor. Investor mempercayai suatu perusahaan jika mereka yakin dengan strategi yang diterapkan untuk mendukung kepentingan investor. Pengungkapan informasi yang lebih tepat dan transparan juga meningkatkan kepercayaan investor terhadap perusahaan. Industri yang berfokus pada investor lebih transparan dalam menyebarkan informasi berkualitas semakin tinggi terutama laporan yang dapat memberikan konten pengungkapan informasi yang semakin lengkap dan komprehensif tentang kinerja berkelanjutan perusahaan yang dapat memperoleh umpan balik investor yang positif. Ini membantu investor menilai potensi masa depan perusahaan.

Kecenderungan pemegang saham dalam pengambilan keputusan untuk memaksimalkan tindakan yang dapat mendukung keberlanjutan perusahaan seperti tindakan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Sehingga guna meningkatkan citra perusahaan, perusahaan dituntut oleh pemegang saham untuk melaksanakan penginformasian tindakan sosial, lingkungan, dan ekonomi sehingga mereka akan menuntut perusahaan untuk melakukan pengungkapan atas tindakan ekonomi, sosial, dan lingkungan tersebut guna meningkatkan reputasi perusahaan. Berdasarkan teori *stakeholder* bahwa seluruh pemangku kepentingan salah satunya ialah investor/pemegang saham berhak atas pengungkapan informasi perusahaan baik keuangan ataupun non-keuangan. Investor juga membutuhkan pengungkapan informasi terkait sosial lingkungan untuk pertimbangan dalam mengambil

keputusan sehingga investor akan berupaya mendapatkan laporan yang berkualitas melalui mekanisme pengawasan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), pemilik saham mayoritas memiliki kekuatan yang menentukan dalam memberikan suara untuk keberlanjutan perusahaan. Persyaratan kewajiban loyalitas di beberapa negara melarang pemegang saham mayoritas untuk bertindak dengan cara yang dapat merugikan kepentingan perusahaan secara keseluruhan, terutama keberlanjutan perusahaan. Selain itu, pemegang saham dapat memberikan tekanan yang lebih tinggi dengan terus mengawasi keberlanjutan perusahaan dengan tingkat konsentrasi kepemilikan yang tinggi. Oleh karena itu, tekanan pemegang saham dapat meningkatkan pengungkapan informasi air.

Tingkat penyebaran kepemilikan saham yang tinggi dapat memberikan tekanan pada perusahaan untuk mengawasi keberlanjutannya. Oleh karena itu, diasumsikan bahwa pemegang saham memiliki pengaruh positif terhadap kualitas pengungkapan informasi air. Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian (Suharyani, 2019), yang mengemukakan bahwa tekanan *stakeholder* memiliki pengaruh positif terhadap kualitas pengungkapan informasi air.

Hal ini sejalan dengan penelitian Wicaksono dan Setiawan (2022), Wicaksono dan Setiawan (2023), Zeng et al., (2020), Hazelton (2013), (Burrirt et al., 2016), Malone, Fries dan Jones (1993), Christopher dan Hassan (1996), Craswell dan Taylor (1992) dan Frost (1999), Eng dan Mak (2003), Eljido-Ten (2007), dan Gamerschlag et al (2011), yang menyatakan bahwa *stakeholder*

pressure terbukti berpengaruh positif terhadap *water disclosure*. Dengan kata lain, perusahaan-perusahaan yang mendapatkan tekanan yang lebih besar dari *stakeholder* cenderung akan lebih lengkap dengan mengungkapkan *water disclosure*.

Hasil ini mengkonfirmasi relevansi teori legitimasi dan teori *stakeholders* yang mengindikasikan bahwa *sustainability* merupakan bagian dari upaya pengungkapan perusahaan dalam merespon *stakeholders pressure*. Hasil ini cenderung senada dengan riset terdahulu dari Nazari et al., (2015) bahwa tekanan eksternal yang berperan sebagai motivator dan tekanan internal yang berperan sebagai *fasilitator* terbukti berkaitan dengan peningkatan *sustainability report*.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang mendukung, sampai pada pemahaman penulis bahwa terdapat pengaruh *stakeholder pressure* terhadap *water disclosure*. Perusahaan perlu mengungkapkan aktivitas non finansial seperti misalnya aktivitas masyarakat dan informasi air untuk memberikan perspektif yang baik di mata publik. Menjaga nama baik atau reputasi perusahaan di mata publik tersebut perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan menjaga hubungan dengan berbagai *stakeholder*, salah satunya *stakeholder* konsumen, karyawan, serta lingkungan. Dimana, para *stakeholder* akan memberikan semacam input yang dapat juga berupa suatu tekanan kepada perusahaan dalam meningkatkan kualitas, kuantitas, maupun transparansi dengan adanya pengungkapan air.

2.2.2 Pengaruh *Corporate Governance Disclosure* Terhadap *Water Disclosure*

Corporate Governance Disclosure sangat penting untuk mengelola dampak aktivitas perusahaan terhadap kualitas air. Salah satu pilar tata kelola yang penting adalah pemegang saham yang dapat mengendalikan perusahaan melalui kepemilikan. Sebagai prinsipal, pemegang saham mengharapkan agen manajer bertindak demi kepentingan terbaik mereka untuk memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Ketika permintaan akan informasi air meningkat, pemegang saham akan memainkan peran penting dalam mendorong dan mengawasi para tata pengelola perusahaan untuk terlibat dalam kegiatan tersebut. Selanjutnya, pemegang saham meminta agar tata pengelola perusahaan bersikap transparan dengan melakukan pengungkapan air, yang penting untuk kelangsungan hidup.

Corporate Governance Disclosure secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholder*. Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini, pertama yaitu pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi air dengan benar dan tepat pada waktunya dan, kedua yaitu kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu, transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan *stakeholder* (Harinurdin Erwin & Safitri Amelia Karin, 2023).

Corporate Governance dalam hal pengawasan menjadi efektif ketika kinerja lingkungan yang diungkapkan perusahaan dilakukan secara transparan dan terbuka. Sebaliknya, pengawasan perusahaan menjadi tidak efektif dan lemah, ketika perusahaan menutup-nutupi kinerja pengungkapan hanya demi mendapatkan

pengakuan atau legitimasi dari *stakeholder*. Hal ini termasuk dalam melakukan pengawasan atas pelaporan pengungkapan air bahwa semakin lengkap tata kelola perusahaan, maka akan semakin lengkap informasi terkait air yang diungkapkan perusahaan.

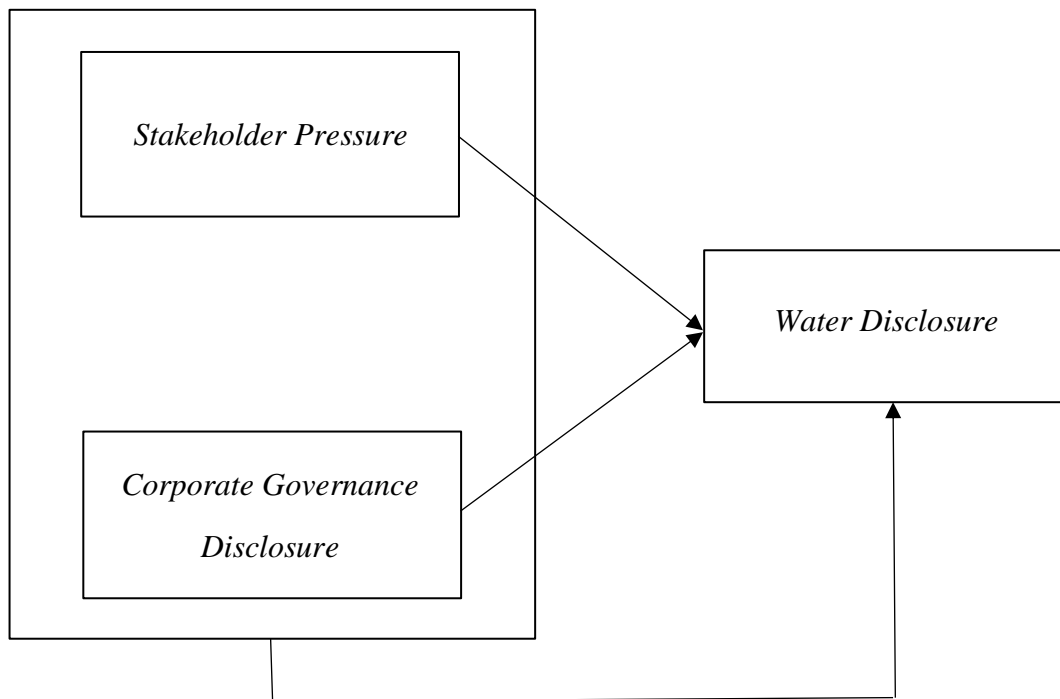
Corporate Governance Disclosure merupakan instrumen yang digunakan untuk mengungkapkan informasi-informasi tata kelola perusahaan mencakup dewan direksi, komisaris independen, komite audit, struktur kepemilikan serta informasi lain terkait tata kelola perusahaan. Perusahaan yang mengungkapkan *Corporate Governance* dengan baik dan memiliki skor dengan kategori yang tinggi dapat meningkatkan kinerja lingkungan dengan pengungkapan informasi perusahaan air. Data tersebut diperkuat oleh pernyataan otoritas jasa keuangan yang mengungkapkan bahwa *Corporate Governance Disclosure* dengan baik akan mempengaruhi keefektifan pengontrolan kegiatan manajemen, termasuk pengungkapan informasi air. Perusahaan yang besar akan melakukan pengungkapan yang lebih luas karena memiliki risiko tinggi. Perusahaan berskala besar tidak akan lepas dari pantauan dan tekanan pemegang saham, sehingga harus memiliki keterbukaan pada publik. Oleh karena itu, semakin lengkap tata kelola perusahaan maka pengungkapan informasi air pada laporan keuangan perusahaan akan memberikan tingkat terhadap pengungkapan informasi air.

Hal ini sejalan dengan penelitian Botha (2022), Salehi et al (2017), Jensen dan Meckling (1976), Pham dan Tran (2020), Dias et al., (2019), Zeng et al (2020), Harinurdin Erwin et al (2023), Vivianita et al., (2018), Majidah dan Habiebah

(2019), dan Dias et al (2019), yang menunjukkan bahwa *corporate governance disclosure* berpengaruh terhadap *water disclosure*.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang mendukung, sampai pada pemahaman penulis bahwa terdapat pengaruh *corporate governance disclosure* terhadap *water disclosure*. Perusahaan menunjukkan bahwa telah banyak dianalisis sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan atau keberlanjutan (Gunawan, 2016). Penelitian sebelumnya yang diterbitkan dalam jurnal bereputasi telah membahas pengungkapan air di Indonesia dalam arti tertentu dari perspektif akuntabilitas. Penelitian tentang pengungkapan informasi lingkungan berkembang pesat dan menambah repertoar literatur akuntansi lingkungan. Namun, keadaan ini merupakan latar belakang penelitian yang menganalisis tingkat pengungkapan air di Indonesia. Penelitian terkait *corporate governance disclosure* terhadap informasi air juga tidak secara spesifik mengungkapkan informasi air dan lokasinya. Kesenjangan dalam literatur ini akan ditutup oleh penelitian yang akan dilakukan untuk menguji tingkat keterbukaan informasi air dan faktor yang mempengaruhi pengungkapan tersebut, terutama pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan manufaktur berkontribusi signifikan terhadap masalah air di Indonesia.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas serta untuk menggambarkan Pengaruh *Stakeholder Pressure* dan *Corporate Governance Disclosure* Terhadap *Water Disclosure*, maka dibuat suatu kerangka pemikiran sebagai berikut :



Gambar 2. 1

Kerangka Pemikiran

Sumber : Hasil olah data (2024)

2.3 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2019:99) pengertian Hipotesis Penelitian adalah sebagai berikut :

”Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan teori – teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta – fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian.”

Penelitian yang merumuskan hipotesis adalah penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Pada penelitian kualitatif, tidak dirumuskan hipotesis, tetapi justru diharapkan dapat ditemukan hipotesis. Selanjutnya hipotesis, tersebut akan diuji oleh peneliti dengan menggunakan pendekatan kuantitatif.

Berdasarkan pendapat tersebut ada 2 hipotesis yang penulis ajukan yaitu sebagai berikut :

H1 = *Stakeholder Pressure* berpengaruh positif terhadap *Water Disclosure*

H2 = *Corporate Governance Disclosure* berpengaruh positif terhadap *Water Disclosure*